

**PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN KEBERATAN**

No.	Persyaratan Keberatan	Penelitian Persyaratan **)		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa			
2.	Surat Kuasa bermeterai cukup apabila permohonan dikuasakan			
3.	Identitas wajib Pajak Identitas pengurus atau direksi atau yang dikuasakan*)			
4.	Jangka waktu permohonan tidak melampaui 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT atau SKPD			
5.	Fotokopi SPPT PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir			
6.	Fotokopi sertifikat atau status tanah			
7.	Fotokopi kartu keluarga untuk waris			
8.	Fotokopi Akta Pendirian atau Perubahan *)			
9.	Surat penunjukan ahli waris dari para ahli waris dalam hal permohonan diajukan oleh ahli waris dan diketahui oleh pejabat			
10.	Dokumen penunjang lainnya yang berhubungan dengan pengajuan keberatan : 1) ..... 2) ..... 3) .....			

Keterangan :

\*) untuk wajib pajak badan

\*\*) ada/tidak ada diberi tanda (√ )

Peneliti,

(Nama jelas)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

JOKO WIDODO

**RESUME HASIL PENELITIAN KEBERATAN**

- A. Data Wajib Pajak/Kuasa
1. Nama Wajib Polak : .....
  2. Alamat Wajib Pajak : .....
  3. Nomor Identitas diri : .....
  4. Nama Kuasa : .....
  5. Alamat Kuasa : .....
  6. Nomor Identitas diri Kuasa : .....
- B. Data Objek Pajak
1. Nomor Objek Pajak : .....
  2. Alamat Objek Pajak : .....
  3. Luas Bumi : ..... m<sup>2</sup>
  4. Luas Bangunan : ..... m<sup>2</sup>
  5. NJOP Bumi : Rp. ....
  6. NJOP Bumi Bersama : Rp. ....
  7. NJOP Bangunan : Rp. ....
  8. NJOP Bangunan Bersama : Rp. ....
- C. Alasan Pengajuan Keberatan
- .....
- .....
- D. Pembahasan Permohonan Keberatan
1. Dasar hukum : .....
  2. Uraian keberatan : .....
- E. Hasil Pembahasan
1. Diterima dengan alasan : .....
  2. Ditolak dengan alasan : .....

Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala UPPD,

(.....)  
NIP .....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

JOKO WIDODO

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR.....

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD PBB-P2  
NOMOR .....TANGGAL.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal..... yang diterima Dinas/Suku Dinas/UPPD..... berdasarkan tanda terima Nomor ..... tanggal..... bulan..... tahun..... atas SPPT/SKPD PBB-P2\*) Nomor..... Tahun Pajak..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 Nomor..... tanggal..... perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2 atas SPPT/SKPD PBB-P2 Nomor ..... tanggal.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD PBB-P2 NOMOR..... TANGGAL .....

KESATU :

Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak/Menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang\*) atas pengajuan keberatan PBB-P2 :

- a. Wajib Pajak  
Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....
- b. SPPT/SKPD PBB P-2\*)  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
PBB-P2 yang terutang : Rp. ....
- c. Objek Pajak  
Alamat : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota Administrasi : .....

KEDUA :

Besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi sebesar Rp.....  
(.....)

KETIGA :

Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut

Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP/m <sup>2</sup> (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	.....	.....	.....	.....	.....
Menjadi	.....	.....	.....	.....	.....

KETIGA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala UPPD\*),

.....  
NIP.....

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak
2. Kepala Dinas/Suku Dinas/UPPD \*)
3. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta

Keterangan

\*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran IV  
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 203 TAHUN 2012  
Tanggal : 20 Desember 2012

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR.....

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SECARA KOLEKTIF  
ATAS SPPT/SKPD PBB-P2 NOMOR .....TANGGAL.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara kolektif Nomor ..... tanggal..... bulan..... tahun..... melalui Organisasi/Kelurahan\*) ..... yang diterima Dinas/Suku Dinas/ UPPD..... berdasarkan tanda terima Nomor ..... tanggal..... atas SPPT Tahun Pajak..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 Nomor..... tanggal ..... perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif atas SPPT/SKPD PBB-P2 Nomor ..... tanggal.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT/SKPD PBB-P2 NOMOR..... TANGGAL .....

KESATU :

Memberikan keputusan atas pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Keberatan PBB-P2 secara kolektif yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA :

Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala UPPD\*),

.....  
NIP.....

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada

1. Wajib Pajak
2. Kepala Dinas/Suku Dinas/UPPD \*)
3. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta

Keterangan

\*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

JOKO WIDODO